



BUPATI MOJOKERTO

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 56 TAHUN 2017 TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal BAB II Pasal 2(dua) ditambahkan 3(tiga) ayat sehingga Pasal 2(dua) berbunyi sebagai berikut :


Pasal 2

- (1) Setiap Kepala Desa, PTPKD dan orang atau Badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan anggaran berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa;
 - (2) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 1. Perencanaan dan Penganggaran;
 2. Pelaksanaan;
 3. Penatausahaan; dan
 4. Pertanggungjawaban dan Pelaporan.
 - b. Kode Rekening; dan
 - c. Format dan Contoh.
 - (3) Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara terperinci sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (4) Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan melalui RKD;
 - (5) Dalam hal RKD disita menjadi barang bukti perkara pidana, Pemerintah Desa dapat membuka RKD baru yang diketahui camat dan dilaporkan kepada Bupati;
 - (6) RKD baru digunakan sampai dengan dikembalikannya RKD yang disita dan selanjutnya dilakukan penutupan terhadap RKD baru tersebut.
2. Ketentuan dalam Lampiran I:
 - a. Bagian I.III.D. angka 1 (satu) huruf b diubah;
 - b. Bagian I.III.D. angka 2 (dua) diubah;
 - c. Bagian II.II.B, angka 1 (satu) diubah;
 - d. Bagian II.III. huruf I diubah;sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 6 Desember 2017

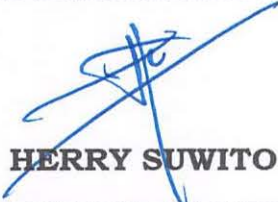
BUPATI MOJOKERTO



MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 63

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 56 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 8
TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

**BAGIAN I
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

III. Penyusunan APBD Desa

D. Kebijakan Penyusunan APB Desa

1. Struktur Organisasi Keuangan Pemerintah Desa

b) Sekretaris Desa

Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan tugas:

- 1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
- 2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa, perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa;
- 4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa;
- 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP).

Sekretaris Desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

2. Struktur APB Desa

Struktur APB Desa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa adalah sebagai berikut :

a) Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan desa terdiri dari:

1) Pendapatan asli Desa

Pendapatan asli Desa adalah penerimaan Desa yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan otonomi Desa, baik dalam bentuk hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.

(a) Hasil usaha Desa

Hasil usaha Desa adalah seluruh hasil usaha perekonomian Desa yang dikelola dalam bentuk badan hukum atau secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Contoh Badan Usaha Milik Desa (Bum-Desa), Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD), Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Hasil usaha melalui kerjasama Desa dengan pihak ketiga, dan lain-lain hasil usaha Desa yang sah.

(b) Hasil pengelolaan kekayaan Desa

Hasil kekayaan Desa adalah seluruh kekayaan Desa yang dilakukan secara swakelola oleh pemerintah Desa yang menimbulkan penerimaan bagi pendapatan Desa. Seperti Tanah Kas Desa, Pasar Desa, Pasar Hewan, Tambatan Perahu, Pelelangan Ikan yang dikelola oleh Desa, dan lain-lain kekayaan milik Desa.

Pendapatan dari hasil pengelolaan Tanah Kas Desa diprioritaskan digunakan untuk pembayaran :

- 1) Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari Tanah Kas Desa;
- 2) Tambahan insentif RT/RW;
- 3) Jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- 4) Pemberian tali asih/cinderamata purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Hasil pengelolaan Khusus Tanah Bengkok yang seluruhnya dapat digunakan untuk Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa. Penggunaannya tidak termasuk dalam perhitungan Belanja APB Desa 30% (Tiga puluh per seratus) dan 70% (Tujuh puluh per seratus).

(c) Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat
Swadaya dan partisipasi, serta Gotong royong masyarakat adalah seluruh bentuk kontribusi masyarakat Desa, baik dalam bentuk barang dan tenaga (yang dapat dinilai dengan uang) maupun dalam bentuk uang yang menimbulkan penerimaan. Seperti Penyediaan bahan baku lokal, Partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam membangun kantor Desa.

(d) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah

Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah adalah penerimaan Desa (yang tidak diperoleh dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong masyarakat), seperti hasil penjualan kekayaan Desa.

2) Transfer

a) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja kabupaten dan digunakan untuk membiayai

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- 1) Keadilan, dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
- 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- 3) Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- 4) Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- 5) Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- 6) Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas penggunaan tersebut harus dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Dana Desa digunakan untuk membiayai Pembangunan Desa, yang meliputi:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;
 - e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
 - a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
 - a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil/kapal motor untuk ambulan Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan

- m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan PAUD;
 - c) buku dan peralatan belajar PAUD lainnya;
 - d) wahana permainan anak di PAUD;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan;
 - c) irigasi Desa;
 - d) percetakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkapan ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan);
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;

- b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
- a) pondok wisata;
 - b) panggung hiburan;
 - c) kios cenderamata;
 - d) kios warung makan;
 - e) wahana permainan anak;
 - f) wahana permainan *outbound*;
 - g) taman rekreasi;
 - h) tempat penjualan tiket;
 - i) rumah penginapan;
 - j) angkutan wisata; dan
 - k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penggilingan padi;
 - b) peraut kelapa;
 - c) penepung biji-bijian;

- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1. pembuatan terasering;
- 2. kolam untuk mata air;
- 3. plesengan sungai;
- 4. pencegahan abrasi pantai; dan
- 5. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- 2. pembangunan gedung pengungsian;
- 3. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- 4. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- 5. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

Adapun kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa meliputi:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

- 1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, *HIV/AIDS*, *tuberculosis*, *hipertensis*, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - d) bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa;

- h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) fasilitasi keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia.

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- a) pengelolaan terminal Desa;
 - b) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - c) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;

- b) koran Desa;
- c) website Desa;
- d) radio komunitas; dan
- e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) meubeler kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;
 - i) pedagang pengepul; dan

- j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) hutan kemitraan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa;

- c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) penyediaan informasi harga/pasar;
 - b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - c) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- 1. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- 2. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- 3. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- 4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- 1. pembibitan pohon langka;
- 2. reboisasi;
- 3. rehabilitasi lahan gambut;
- 4. pembersihan daerah aliran sungai;
- 5. pemeliharaan hutan bakau;
- 6. perlindungan terumbu karang; dan
- 7. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis

- 1. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat, antara lain:
 - a) pengembangan lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - b) pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :

- a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. Melakukan pendampingan masyarakat Desa yang berkelanjutan, antara lain:
- a) pelatihan kepemimpinan;
 - b) pembentukan kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c) pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
9. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan pembentukan dan pengembangan koperasi;
 - d) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa, antara lain:
 - 1) warga Desa pengelola usaha ekonomi produktif;
 - 2) tenaga kerja usia produktif;
 - 3) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 4) kelompok perempuan;
 - 5) kelompok pemuda;
 - 6) kelompok tani;
 - 7) kelompok nelayan;
 - 8) kelompok pengrajin; dan
 - 9) warga Desa dan/atau kelompok yang lainnya sesuai kondisi Desa.
 - e) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
10. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;

- e) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- f) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

b) Alokasi Dana Desa

Pemerintah daerah kabupaten sesuai amanat Undang-Undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD kabupaten setiap tahun anggaran. Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pengalokasian ADD kepada setiap desa mempertimbangkan:

- 1) Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.
- 2) Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Secara umum maksud diberikannya ADD adalah dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta penanggulangan kemiskinan.

Adapun tujuan khusus pemberian ADD adalah :

- a) Mendukung operasional penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b) Meningkatkan pembangunan prasarana dan sarana pedesaan;
- c) Pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Perhitungan Besaran ADD_x (ADD tiap-tiap Desa)

a. Rumus ADD yang dipergunakan untuk menghitung besarnya ADD untuk setiap Desa sebagai berikut :

- 1) Rumus penetapan ADD :

$$\sum ADD_x = \sum (ADDM + ADDP)$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa x.

ADDM = Alokasi Dana Desa Minimal (Perolehan Desa sama) sebesar 60%.

ADDP = Alokasi Dana Desa Proporsional (Berdasarkan koefisien variable-variabel) sebesar 40%.

- 2) Formula Penerimaan ADD kepada Desa :

$$ADD = ADDM + BD_x (ADDP)$$

BD_x adalah Nilai Bobot Desa (BD) pada Desa x

3) Rumus Penetapan Nilai Bobot Desa (BDx) Desa x

$$BDx = a1 KV1 + a2 ++ a8 KV8$$

a1, a2a8 : adalah angka bobot masing-masing variable

KV1, KV2KV8 : adalah koefisien masing-masing variable

b. Rumus Koefisien Variabel Desa x

1) KV Jumlah Perangkat Desa
 $\frac{\text{Jumlah Perangkat Desa di Desa}}{\text{Jumlah Perangkat Desa se Kab.}}$

2) KV Kemiskinan
 $\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa}}{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa se Kab.}}$

3) KV Jumlah Penduduk
 $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kab.}}$

4) KV Luas Wilayah
 $\frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kab.}}$

5) KV Keterjangkauan (km)
 $\frac{\text{Jarak Desa ke Kabupaten}}{\text{Jumlah Jarak Desa ke Kab.}}$

c. Penetapan Variabel Dan Bobot Variabel

| Variable | Notasi Variabel | Notasi Bobot | Bobot |
|--------------------|-----------------|--------------|----------|
| a. Perangkat Desa | V1 | a1 | 0,5 |
| b. Kemiskinan | V2 | a2 | 0,2 |
| c. Jumlah Penduduk | V3 | a3 | 0,1 |
| d. Luas Wilayah | V4 | a4 | 0,1 |
| e. Keterjangkauan | V5 | a5 | 0,1 |
| Jumlah | | | 1 |

d. Data Variabel

- 1) Data Perangkat Desa adalah jumlah Perangkat Desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun di Desa bersumber dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto;
- 2) Data Kemiskinan adalah jumlah penduduk miskin di Desa bersumber dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mojokerto dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto (variabel ini mewakili kemampuan

- masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan);
- 3) Data Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk Desa bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto dan/atau Kecamatan;
 - 4) Data Luas Wilayah adalah luas wilayah Desa berdasarkan Data Kecamatan dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto;
 - 5) Data Keterjangkauan adalah jarak Desa ke Kabupaten berdasarkan data Kecamatan dan/atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Mojokerto.

Penggunaan ADD yang diterima oleh desa digunakan untuk :

- a) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan penghitungan sebagai berikut :
 - 1) ADD yang berjumlah kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh perseratus);
 - 2) ADD yang berjumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh perseratus);
 - 3) ADD yang berjumlah lebih dari Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 40% (empat puluh perseratus); dan
 - 4) ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (tiga puluh perseratus).

Sedangkan prosentase besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :

- a) Kepala Desa;
- b) Sekretaris Desa paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan; dan
- c) Perangkat Desa selain sekretaris Desa paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilan tetap kepala Desa per bulan.

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pada jabatannya dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{PT/\text{bulan}}{N+3,5}$$

$$K = P \times 2$$

$$S = P \times 1,5$$

- P = Besaran penghasilan tetap Perangkat Desa
PT = Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
N = Jumlah Formasi Jabatan Perangkat Desa
K = Besaran penghasilan tetap Kepala Desa
S = Besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa

b) Setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebesar 30 % (Tiga Puluh per Seratus) digunakan untuk belanja operasional pemerintah desa meliputi :

- 1) Biaya operasional pemerintah desa yang terdiri dari :
 - (a) Biaya operasional kebutuhan listrik, air dan telpon;
 - (b) Biaya perjalanan dinas;
 - (c) Biaya rapat dinas;
 - (d) Biaya pembelian ATK;
 - (e) Biaya langganan jaringan internet;
 - (f) Biaya penyusunan Laporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
 - (g) Biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - (h) Biaya pengadaan buku administrasi desa;
 - (i) Biaya operasional pendataan profil desa;
 - (j) Biaya operasional operator Siskeudes dan SIM PKK;
 - (k) Biaya pengadaan inventaris kantor desa;
 - (l) Biaya operasional Pemerintahan Desa Lainnya.

- 2) Biaya operasional dan tunjangan BPD
 - (a) Untuk jumlah anggota BPD 5 (Lima) orang sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah)
 - (b) Untuk jumlah anggota BPD 7 (Tujuh) orang sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah)
 - (c) Untuk jumlah anggota BPD 9 (Sembilan) orang sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah)
 - (d) Untuk jumlah anggota BPD 11 (Sebelas) orang sebesar Rp.14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah)

Rencana penggunaan operasional dan tunjangan BPD disusun dan ditetapkan dalam musyawarah BPD.

Laporan administrasi keuangan BPD wajib disampaikan secara tertulis kepada Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan keuangan desa.

c) Sebesar 70 % (Tujuh Puluh per Seratus) setelah dikurangi penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa digunakan untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;

- 1) Sebesar 70 % (Tujuh Puluh per Seratus) diprioritaskan dipergunakan untuk :
 - (a) Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - (b) Pemberdayaan Gugus Tugas PPA;
 - (c) Pemberdayaan Pos PAUD;
 - (d) Pendirian dan pengembangan Taman Bacaan Masyarakat;
 - (e) Pengembangan Karang Pangan Lestari (KRPL);
 - (f) Pendirian dan pengembangan bank sampah;
 - (g) Pemberdayaan Taman Posyandu.

2) Sebesar 30 % (Tiga Puluh per Seratus) dipergunakan untuk biaya pemberdayaan kelompok masyarakat (LPM, PKK, RT/RW, Hansip dll)

c) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi

Pemerintah kabupaten mengalokasikan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (Sepuluh per Seratus) dari Realisasi Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten. Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi kepada desa tersebut ditetapkan dalam Peraturan Bupati, berdasarkan ketentuan:

- a) 60% (Enam Puluh per Seratus) dibagi secara merata kepada seluruh desa.
- b) 40% (Empat Puluh per Seratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing.

Pemberian bagian dari hasil Pajak Daerah dan bagi hasil Retribusi Daerah bertujuan :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. meningkatkan kemampuan Desa dalam mendukung pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa;
3. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Penggunaan dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Pendapatan bagian dari hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan (Buku 1, 2, dan 3) digunakan untuk :
 - 1) 80 % (Delapan Puluh per Seratus) untuk insentif Tim Intensifikasi PBB Desa;
 - 2) 20 % (Dua Puluh per Seratus) untuk tambahan tunjangan RT/RW.
- b) Pendapatan bagian dari hasil Pajak dan Retribusi selain sebagaimana tersebut huruf (a) di atas digunakan untuk menunjang biaya operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d) Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten

Pemerintah daerah provinsi/kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD provinsi/kabupaten kepada desa sesuai dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang bersangkutan. Bantuan tersebut diarahkan untuk percepatan pembangunan desa. Bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan Keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya

ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan bersifat khusus yang dikelola dalam APB Desa tidak diterapkan ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (Tujuh Puluh per Seratus) dan paling banyak 30% (Tiga Puluh per Seratus).

3) Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah

Kelompok Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah berupa Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ke tiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

BAGIAN II PELAKSANAAN

II. Pelaksanaan Penerimaan Pendapatan

B. Transfer Desa

1) Dana Desa (DD)

Dana Desa ditransfer melalui APBD kabupaten untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa. Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan maksud dan tujuan meningkatkan pembangunan dan kemampuan desa dalam rangka mencapai kemandirian desa.

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya dari kabupaten disalurkan ke desa dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Kas Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:

- (a) Tahap I, paling cepat bulan Maret paling lambat bulan Juli sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
- (b) Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Sedangkan Tata Cara Penyaluran diatur sebagai berikut :

1. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat setelah diverifikasi oleh Camat, dilampiri dengan :

Untuk DD Tahap I :

- a) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun berjalan;
- b) Laporan Penyerapan dan Capaian Output Dana Desa tahun sebelumnya;
- c) Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD);
- d) Tanda terima (kuitansi) Dana Desa tahap I ditandatangani Kepala Desa dan bermaterai;
- e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak penggunaan Dana Desa tahap I ditandatangani Kepala Desa;
- f) Foto copy Buku Rekening Kas Desa (RKD); dan
- g) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.

Untuk DD Tahap II :

- a) Laporan Realisasi Dana Desa tahap I, menunjukkan Penyerapan paling kurang 75 % (tujuh puluh lima per seratus) dan Capaian Output paling kurang 50 % (lima puluh per seratus);
- b) Tanda terima (kuitansi) Dana Desa tahap II ditandatangani Kepala Desa dan bermaterai;
- c) Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak penggunaan Dana Desa tahap II ditandatangani Kepala Desa; dan
- d) Lampiran hasil verifikasi oleh Camat.

2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meneruskan permohonan yang sudah memenuhi syarat kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan penyaluran dan meneruskannya kepada Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto;
3. Berdasarkan persetujuan sebagaimana tersebut huruf b, Kepala BPKAD menerbitkan SP2D sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa melalui transfer pada Bank Pemerintah;
4. Kepala Desa bertanggungjawab mutlak terhadap pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa;
5. Bagi desa yang belum mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa pada tahun berjalan, hanya dapat mengajukan permohonan penyaluran pada 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.

III. Pelaksanaan Pengeluaran/Belanja

I. Kuitansi dan Perpajakan

1. Pembayaran kepada pihak ketiga baik melalui Bendahara Desa maupun oleh pelaksana kegiatan dibuatkan bukti transaksinya berupa kuitansi pengeluaran.
2. Jika terdapat kewajiban potongan/pungutan pajak maka dalam kuitansi diinformasikan potongan dan pungutan pajak tersebut.
3. Pemungutan/pemotongan pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya merupakan kewajiban Bendahara Desa ketika melakukan pembayaran kepada pihak penerima.
4. Kewajiban potongan/pungutan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya wajib disetor ke Rekening Kas Negara sesuai batasan waktu yang diatur dalam ketentuan perpajakan.
6. Pemotongan Pajak adalah istilah yang digunakan pengenaan pajak penghasilan (PPH) atas pengeluaran yang sudah jelas/pasti sebagai penghasilan oleh penerimanya. Misal pengeluaran untuk gaji, upah, honorarium, sewa, dan lain sebagainya. Bendahara diwajibkan memotong PPh atas pembayaran terhadap penerima.
7. Jenis-jenis PPh yang dilakukan pemotongan adalah PPh perorangan (PPh Pasal 21, dan PPh Pasal 23) Pemungutan pajak diterapkan pada PPh Pasal 22 dan PPN.
8. Secara umum PPh Pasal 22 dikenakan pada pengadaan barang dengan nilai batas sesuai ketentuan diatas Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) dengan tarif 1,5 % (satu koma lima per seratus) di luar PPN. Sedangkan PPN dikenakan kepada Barang/Jasa Kena Pajak dengan tarif 10% (Sepuluh perseratus).

Contoh format kuitansi pengeluaran adalah sebagai berikut :

Contoh Kuitansi Pengeluaran

| KUITANSI PENGELUARAN | |
|--|---|
| Nomor Kuitansi | |
| Sudah terima dari | : |
| Banyaknya uang | : =.....= |
| Untuk Pembayaran | : |
| Nama Kegiatan | : |
| Kode Rekening | : |
| Belanja | : |
| Potongan Pajak | |
| Nilai | : |
| Pot. Pajak PPN | : |
| Pot. Pajak Penghasilan | : |
| Total yang dibayarkan | : |
| Terbilang | Rp. <input type="text"/> |
| Menyetujui Kepala Desa | Dibayar Oleh, Bendahara Desa |
| <i>Cap, Tanda Tangan</i> Nama Jelas Kepala Desa | <i>Cap, Tanda Tangan</i> Nama Jelas Bendahara Desa |

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 8
 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA

KODE REKENING

1. Kode Rekening Bidang dan Kegiatan

| Kode Rekening | Uraian |
|---------------|---|
| 1 | 2 |
| 1 | <i>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</i> |
| 1 1 | Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 1 2 | Operasional Perkantoran |
| 1 3 | Operasional dan tunjangan BPD |
| 1 4 | Insentif RT dan RW |
| 1 5 | Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa |
| 1 6 | Kegiatan penguatan administrasi desa |
| 1 7 | Penyusunan, Pengembangan Tata Ruang dan Peta Sosial Desa |
| 1 8 | Pendataan Desa |
| 1 9 | Penetapan organisasi Pemerintahan desa |
| 1 10 | Pembentukan BPD |
| 1 11 | Pemilihan kepala desa dan pengangkatan pejabat Kepala Desa |
| 1 12 | Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa |
| 1 13 | Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa |
| 1 14 | Penyelenggaraan Musyawarah Desa |
| 1 15 | Penyelenggaraan Perencanaan Desa |
| 1 16 | Penyusunan Produk hukum Desa |
| 1 17 | Sosialisasi peraturan perundang-undangan |
| 1 18 | Penyelenggaraan Evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa |
| 1 19 | Penyelenggaraan kerjasama antar Desa |
| 1 20 | Fasilitasi Pelaksanaan pemilihan umum / pemilihan kepala daerah |
| 1 21 | Fasilitasi Bidang keagrariaan/Sertifikasi aset-aset desa |
| 1 22 | Penyusunan pelaporan LPPD, LKPJ akhir anggaran dan akhir masa jabatan |
| 1 23 | Fasilitasi Peringatan hari besar nasional dan hari besar keagamaan |
| 1 24 | Pengadaan aset desa, inventarisasi aset desa dan pengelolaan sumber pendapatan desa |
| 1 25 | Penetapan dan Penegasan batas desa |
| 1 26 | Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura Batas Desa |
| 1 27 | Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor desa dan fasilitas penunjang lainnya |
| 1 28 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | 2 |
|----------|--|
| 2 | <i>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</i> |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Transportasi</i> |
| 2 | 1 Jalan Permukiman |
| 2 | 2 Jalan Poros Desa |
| 2 | 3 Jalan desa antar Permukiman Ke wilayah Pertanian/Jalan usaha Tani |
| 2 | 4 Jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata |
| 2 | 5 Jembatan Desa |
| 2 | 6 Gorong-gorong |
| 2 | 7 Terminal Desa |
| 2 | 8 Pembangunan Tembok Penahan Tanah |
| 2 | 9 Tambatan Perahu |
| 2 | 10 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi :</i> |
| 2 | 11 Pembangkit Listrik tenaga Mikrohidro |
| 2 | 12 Pembangkit Listrik tenaga Diesel |
| 2 | 13 Pembangkit Listrik Tenaga matahari |
| 2 | 14 Instalasi Biogas |
| 2 | 15 Jaringan distribusi tenaga listrik |
| 2 | 16 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa :</i> |
| 2 | 17 Pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin |
| 2 | 18 Selokan/Saluran Drainase |
| 2 | 19 Tempat Pembuangan Sampah |
| 2 | 20 Gerobak Sampah |
| 2 | 21 Kendaraan pengangkut Sampah |
| 2 | 22 Mesin Pengolah dan/atau daur ulang Sampah |
| 2 | 23 Pembangunan Pos Keamanan Lingkungan |
| 2 | 24 Penerangan Lingkungan Pemukiman |
| 2 | 25 Pedestrian |
| 2 | 26 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi :</i> |
| 2 | 27 Jaringan internet untuk warga Desa |
| 2 | 28 Website Desa |
| 2 | 29 Peralatan pengeras Suara (Loudspeaker) |
| 2 | 30 Telepon Umum |
| 2 | 31 Radio Single Side Band (SSB) |
| 2 | 32 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | 2 |
|---|--|
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan :</i> |
| 2 | 33 Air Bersih Berskala Desa |
| 2 | 34 Sanitasi lingkungan |
| 2 | 35 Jambanisasi |
| 2 | 36 Mandi, Cuci, Kakus (MCK) |
| 2 | 37 Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan desa (Gedung Polindes, Gedung Ponkesdes, Gedung Posyandu, Balai pengobatan) |
| 2 | 38 Mobil/Kapal Motor untuk ambulance Desa |
| 2 | 39 Alat bantu penyandang disabilitas |
| 2 | 40 Panti rehabilitasi penyandang disabilitas |
| 2 | 41 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan :</i> |
| 2 | 42 Pembangunan dan pengembangan Gedung PAUD |
| 2 | 43 Buku dan peralatan belajar PAUD |
| 2 | 44 Wahana Permainan anak di PAUD |
| 2 | 45 Balai pelatihan/kegiatan belajar/ Taman bacaan/buku/ bahan bacaan Masyarakat |
| 2 | 46 Taman belajar keagamaan |
| 2 | 47 Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa |
| 2 | 48 Film Dokumenter |
| 2 | 49 Pembangunan dan Pengembangan Taman Seni/Museum/ Sanggar seni dan / atau Peralatan Kesenian Desa |
| 2 | 50 Perbaikan bangunan Cagar budaya (Punden, Candi, Sarkofagus, dll) |
| 2 | 51 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Produksi Usaha pertanian untuk ketahanan Pangan dan usaha pertanian berskala produktif:</i> |
| 2 | 52 Bendungan Berskala kecil |
| 2 | 53 Pembangunan atau perbaikan embung dan/atau sistem pengairan |
| 2 | 54 Pembangunan atau pemeliharaan Irigasi desa |
| 2 | 55 Pembukaan/Percetakan Lahan Pertanian |
| 2 | 56 Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan (kapal penangkap ikan/tambak garam) |
| 2 | 57 Kolam Ikan dan Pembenihan Ikan |
| 2 | 58 Kandang Ternak |
| 2 | 59 Mesin Pakan ternak |
| 2 | 60 Gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan) |
| 2 | 61 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | 2 |
|---|--|
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan Usaha Pertanian yang di fokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk unggulan :</i> |
| 2 | 62 Pengeringan hasil Pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan, dll |
| 2 | 63 Lumbung Desa |
| 2 | 64 Gudang Pendingin (Cold Storage) |
| 2 | 65 Pembangunan Sarana prasarana Pengolahan Kompos/Pupuk Kandang untuk pupuk organik |
| 2 | 66 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jasa dan Industri Kecil yang di fokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk unggulan :</i> |
| 2 | 67 Mesin Jahit |
| 2 | 68 Peralatan Bengkel Kendaraan Bermotor |
| 2 | 69 Mesin Bubut untuk mebeler |
| 2 | 70 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemasaran yang di fokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk unggulan :</i> |
| 2 | 71 Pasar Desa |
| 2 | 72 Pasar Sayur |
| 2 | 73 Pasar hewan |
| 2 | 74 Toko Online |
| 2 | 75 Ruang Promosi produk Unggulan Desa dan/atau produk hasil pertanian dan/atau Perikanan |
| 2 | 76 Gudang Barang |
| 2 | 77 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa Wisata :</i> |
| 2 | 78 Pondok Wisata |
| 2 | 79 Panggung Hiburan |
| 2 | 80 Kios Cenderamata |
| 2 | 81 Kios Warung Makan |
| 2 | 82 Wahana Permainan anak |
| 2 | 83 Wahana Permainan Outbound |
| 2 | 84 Taman Rekreasi |
| 2 | 85 Tempat Penjualan Tiket |
| 2 | 86 Rumah Penginapan |
| 2 | 87 Angkutan Wisata |
| 2 | 88 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | 2 |
|---|--|
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan Ekonomi yang di fokuskan pada kebijakan Satu Desa Satu Produk unggulan :</i> |
| 2 | 89 Penggilingan padi |
| 2 | 90 Peraut kelapa |
| 2 | 91 Penepung Biji-bijian |
| 2 | 92 pencacah pakan ternak |
| 2 | 93 Sangrai Kopi |
| 2 | 94 Pemotong/Pengiris Buah dan Sayuran |
| 2 | 95 Pompa air |
| 2 | 96 Traktor Mini |
| 2 | 97 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana Untuk Pelestarian Lingkungan Hidup :</i> |
| 2 | 98 Pembuatan terasiring |
| 2 | 99 Perlindungan mata air dan/atau Kolam untuk mata air |
| 2 | 100 Plengsengan Sungai |
| 2 | 101 Pencegahan abrasi pantai |
| 2 | 102 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | <i>Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana Untuk Penanggulangan Bencana Alam dan/atau Kejadian luar biasa :</i> |
| 2 | 103 Pembangunan Jalan Evakuasi dalam Bencana Gunung Berapi |
| 2 | 104 Pembangunan Gedung Pengungsian |
| 2 | 105 Pembersihan Lingkungan Perumahan yang terkena bencana alam |
| 2 | 106 Rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam |
| 2 | 107 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| 3 | <i>Bidang pembinaan Kemasyarakatan</i> |
| 3 | 1 Pembinaan Lembaga kemasyarakatan |
| 3 | 2 Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban |
| 3 | 3 Kegiatan Operasional PKK |
| 3 | 4 Pembinaan kerukunan umat beragama |
| 3 | 5 Pengadaan sarana dan prasarana rumah ibadah |
| 3 | 6 Pembinaan lembaga adat |
| 3 | 7 Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat (Petik laut/Nyadran, Bersih desa, Ruwah Desa, pawai Budaya) |
| 3 | 8 Pengelolaan Pemakaman Desa |
| 3 | 9 Kegiatan Senam Bersama |
| 3 | 10 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat |
| | Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap pelayanan Sosial dasar |
| | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan kesehatan masyarakat : |
| 4 | 1 Penyediaan Air Bersih |
| 4 | 2 Pelayanan kesehatan Lingkungan |
| 4 | 3 Pemantauan pertumbuhan dan Penyediaan Makanan Sehat untuk peningkatan Gizi bagi balita dan anak sekolah |
| 4 | 4 Pengelolaan balai pengobatan Desa |
| 4 | 5 Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui |
| 4 | 6 pengobatan untuk lansia |
| 4 | 7 Fasilitasi Keluarga Berencana |
| 4 | 8 Pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas |
| 4 | 9 Kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberculosis, hipertensi, diabetes mellitus dan gangguan jiwa |
| 4 | 10 Bantuan Insentif untuk kader kesehatan masyarakat |
| 4 | 11 Kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak |
| 4 | 12 Pelatihan kader kesehatan masyarakat |
| 4 | 13 Pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan anak |
| 4 | 14 Pelatihan pangan yang sehat dan aman |
| 4 | 15 Pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman |
| 4 | 16 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | Pengelolaan Kegiatan Pelayanan pendidikan dan Kebudayaan : |
| 4 | 17 Bantuan Insentif guru PAUD |
| 4 | 18 Bantuan Insentif guru taman belajar keagamaan |
| 4 | 19 Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan / atau seminar (Workshop) |
| 4 | 20 Penyelenggaraan Kursus seni budaya dan Pendidikan |
| 4 | 21 Bantuan pemberdayaan bidang olahraga |
| 4 | 22 Pelatihan pembuatan film Dokumenter |
| 4 | 23 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | Pengelolaan Sarana dan Prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan Teknis dan Sumber daya Lokal yang tersedia |
| | Pengelolaan Lingkungan Perumahan Desa: |
| 4 | 24 Pengelolaan Sampah Berskala rumah tangga |
| 4 | 25 Pengelolaan Sarana Pengolahan Air Limbah |
| 4 | 26 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | |
| | Pengelolaan Transportasi Desa : |
| 4 | 27 Pengelolaan Terminal desa |
| 4 | 28 Pengelolaan tambatan perahu |
| 4 | 29 Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | | 2 |
|---|----|---|
| | | Pengembangan Energi: |
| 4 | 30 | pengolahan Limbah Peternakan untuk energi biogas |
| 4 | 31 | Pembuatan bioethanol dari ubi kayu |
| 4 | 32 | Pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel |
| 4 | 33 | Pengelolaan Pembangkit listrik tenaga angin |
| 4 | 34 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi : |
| 4 | 35 | Sistem Informasi Desa dan/atau Website Desa |
| 4 | 36 | koran desa |
| 4 | 37 | Radio komunitas |
| 4 | 38 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Pengelolaan Produksi Usaha Pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang di fokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan : |
| 4 | 39 | Pembibitan Tanaman Pangan |
| 4 | 40 | Pembibitan tanaman Keras |
| 4 | 41 | Pengadaan Pupuk |
| 4 | 42 | Pembenihan air tawar |
| 4 | 43 | Pengelolaan usaha hutan desa |
| 4 | 44 | Pengelolaan usaha hutan sosial |
| 4 | 45 | Pengadaan bibit/induk ternak |
| 4 | 46 | Inseminasi buatan |
| 4 | 47 | Pengadaan Pakan ternak |
| 4 | 48 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu desa produk unggulan : |
| 4 | 49 | Tepung Tapioka |
| 4 | 50 | Kerupuk |
| 4 | 51 | Keripik Jamur |
| 4 | 52 | Keripik Jagung |
| 4 | 53 | Ikan Asin |
| 4 | 54 | Abon Sapi, Abon Ikan |
| 4 | 55 | Susu Sapi |
| 4 | 56 | Kopi |
| 4 | 57 | Coklat |
| 4 | 58 | Karet |
| 4 | 59 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Pengelolaan Usaha Jasa dan Industri Kecil Yang Difokuskan pada Kebijakan Satu Desa Satu produk Unggulan : |
| 4 | 60 | Meubeler Kayu dan Rotan |
| 4 | 61 | Alat-alat Rumah tangga |
| 4 | 62 | Pakaian jadi/Konveksi |

| 1 | | 2 |
|---|----|---|
| 4 | 63 | Kerajinan tangan |
| 4 | 64 | Kain tenun |
| 4 | 65 | Kain Batik |
| 4 | 66 | Bengkel Kendaraan Bermotor |
| 4 | 67 | pedagang di Pasar |
| 4 | 68 | Pedagang pengepul |
| 4 | 69 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pendirian dan pengembangan BUMDesa dan /atau BUMDesa Bersama, antara lain :</i> |
| 4 | 70 | Pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama |
| 4 | 71 | Penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama |
| 4 | 72 | Penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama |
| 4 | 73 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pengembangan usaha BUMDesa dan /atau BUMDesa bersama yang di fokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan :</i> |
| 4 | 74 | Pengelolaan Hutan desa dan/atau adat |
| 4 | 75 | Industri Air Minum |
| 4 | 76 | Industri pariwisata Desa |
| 4 | 77 | Industri Pengolahan ikan |
| 4 | 78 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pengembangan usaha BUMDesa dan /atau BUMDesa bersama yang di fokuskan pada Pengembangan usaha layanan jasa :</i> |
| 4 | 79 | Pembangunan dan penyewaan Sarana Prasarana Olahraga |
| 4 | 80 | Pengadaan dan penyewaan alat Transportasi |
| 4 | 81 | Pengadaan dan Penyewaan Peralatan pesta |
| 4 | 82 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang di fokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan :</i> |
| 4 | 83 | Pembentukan Usaha ekonomi Masyarakat |
| 4 | 84 | Bantuan Sarana Produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat |
| 4 | 85 | Hutan Kemasyarakatan |
| 4 | 86 | Kemitraan Kehutanan |
| 4 | 87 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang di fokuskan kepada kebijakan satu desa satu produk unggulan :</i> |
| 4 | 88 | Sosialisasi TTG |
| 4 | 89 | Pos pelayanan teknologi desa (Posyantekdes) dan/atau antar desa |
| | | |

| 1 | | 2 |
|---|-----|--|
| 4 | 90 | Percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perdesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil |
| 4 | 91 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pengelolaan Pemasaran hasil produksi usaha BUMDesa dan usaha ekonomi lainnya yang di fokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan :</i> |
| 4 | 92 | Penyediaan Informasi harga/pasar |
| 4 | 93 | Pameran hasil usaha BUMDesa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi |
| 4 | 94 | Lomba Desa |
| 4 | 95 | Kerjasama perdagangan antar desa dan/atau dengan pihak ketiga |
| 4 | 96 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Penguatan Kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya :</i> |
| 4 | 97 | Penyediaan Layanan Informasi tentang bencana alam |
| 4 | 98 | Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi bencana alam |
| 4 | 99 | Pelatihan Tenaga Sukarelawan untuk penanganan bencana alam |
| 4 | 100 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pelestarian lingkungan hidup, antara lain:</i> |
| 4 | 101 | Pembibitan pohon langka |
| 4 | 102 | Reboisasi |
| 4 | 103 | Rehabilitasi lahan gambut |
| 4 | 104 | Pembersihan daerah aliran sungai |
| 4 | 105 | Pemeliharaan hutan bakau |
| 4 | 106 | Perlindungan terumbu karang |
| 4 | 107 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial</i> |
| | | <i>Mendorong Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh desa:</i> |
| 4 | 108 | Pengembangan sistem Informasi Desa |
| 4 | 109 | pengembangan Pusat kemasyarakatan atau balai rakyat |
| 4 | 110 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | <i>Mengembangkan Program dan kegiatan pembangunan desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa :</i> |
| 4 | 111 | Penyusunan arah pengembangan desa |
| 4 | 112 | Penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan desa yang berkelanjutan |
| 4 | 113 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |

| 1 | | 2 |
|---|-----|--|
| | | Menyusun Perencanaan pembangunan desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal: |
| 4 | 114 | Pendataan potensi dan aset desa |
| 4 | 115 | Penyusunan peta aset desa |
| 4 | 116 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Menyusun Perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal : |
| 4 | 117 | sosialisasi penggunaan dana desa |
| 4 | 118 | Penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal |
| 4 | 119 | Penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal |
| 4 | 120 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Mengembangkan Sistem Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa : |
| 4 | 121 | Pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset desa berbasis data digital |
| 4 | 122 | Pengembangan laporan keuangan dan aset desa yang terbuka untuk publik |
| 4 | 123 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga adat : |
| 4 | 124 | Pengembangan lembaga kemasyarakatan desa dan /atau lembaga adat |
| 4 | 125 | pelatihan Pengurus Lembaga kemasyarakatan Desa dan /atau lembaga adat |
| 4 | 126 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Mendorong Partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa yang dilakukan melalui musyawarah desa: |
| 4 | 127 | Penyebarluasan Informasi kepada masyarakat desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam musyawarah desa |
| 4 | 128 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Melakukan Pendampingan Masyarakat Desa yang berkelanjutan : |
| 4 | 129 | Pelatihan kepemimpinan |
| 4 | 130 | Pembentukan Kader pemberdayaan Masyarakat desa |
| 4 | 131 | Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa |
| 4 | 132 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | Menyelenggarakan Peningkatan Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dengan pengembangan lumbung ekonomi desa yang di fokuskan pada kebijakan satu desa satu produk unggulan : |
| 4 | 133 | Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan |
| 4 | 134 | Pelatihan Teknologi tepat guna |
| 4 | 135 | Pelatihan Pembentukan dan pengembangan koperasi |
| 4 | 136 | Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi kepala desa, perangkat desa, BPD |

| 1 | | 2 |
|---|-----|---|
| 4 | 137 | Kegiatan Pembekalan Tim Pelaksana Kegiatan |
| 4 | 138 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat pengelola Usaha ekonomi Produktif |
| 4 | 139 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat tenaga kerja produktif |
| 4 | 140 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok usaha produktif |
| 4 | 141 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok perempuan dan/ atau PKK |
| 4 | 142 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok pemuda |
| 4 | 143 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok Tani |
| 4 | 144 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok Pengrajin |
| 4 | 145 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok masyarakat miskin |
| 4 | 146 | Pelatihan kerja dan ketrampilan masyarakat kelompok Disabilitas |
| 4 | 147 | Peningkatan kapasitas masyarakat Pemerhati dan Perlindungan anak |
| 4 | 148 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | <i>Pengawasan dan pemantauan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat desa:</i> |
| 4 | 149 | Pemantauan berbasis komunitas |
| 4 | 150 | Audit Berbasis komunitas |
| 4 | 151 | Pengembangan unit Pengaduan di desa |
| 4 | 152 | Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh desa |
| 4 | 153 | Penyelenggaraan Musyawarah desa untuk pertanggungjawaban dan serahterima hasil pembangunan Desa |
| 4 | 154 | Kegiatan Lainnya Sesuai kebutuhan dan kondisi Desa |
| | | |
| 5 | | <i>Bidang Tak Terduga</i> |
| 5 | 1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa |
| 5 | 2 | Kegiatan kejadian luar biasa lainnya |

2. Kode Rekening Pendapatan Desa

| KODE | | | | URAIAN |
|-------------|----------|----------|-----------|--|
| 1 | | | | 2 |
| 1 | | | | PENDAPATAN DESA |
| 1 | 1 | | | Pendapatan Asli Desa |
| 1 | 1 | 1 | | Hasil Usaha |
| 1 | 1 | 1 | 1 | Hasil Laba BUMDesa |
| 1 | 1 | 1 | 2 | Hasil Laba PUEP/PUEM/KOPWAN |
| 1 | 1 | 1 | 3 | Hasil Laba Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMAD) |
| | | | | Dst |
| | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 1 | Tanah Desa |
| 1 | 1 | 2 | 2 | Pasar Desa |
| 1 | 1 | 2 | 3 | Pasar Hewan |
| 1 | 1 | 2 | 4 | Bangunan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 5 | Hutan Milik Desa |
| 1 | 1 | 2 | 6 | Mata Air Milik Desa |
| 1 | 1 | 2 | 7 | Pemandian Umum |
| 1 | 1 | 2 | 8 | Obyek Rekreasi Desa |
| 1 | 1 | 2 | 9 | Lapangan Desa |
| 1 | 1 | 2 | 10 | Aset Desa Lainnya |
| | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong-Royong |
| 1 | 1 | 3 | 1 | Swadaya dan Partisipasi |
| 1 | 1 | 3 | 2 | Gotong-Royong |
| | | | | Dst |
| | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
| 1 | 1 | 4 | 1 | Pungutan Desa |
| 1 | 1 | 4 | 2 | Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan |
| 1 | 1 | 4 | 3 | Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan |
| 1 | 1 | 4 | 4 | Bunga simpanan uang di bank |
| | | | | Dst |
| | | | | |
| 1 | 2 | | | Pendapatan Transfer |
| 1 | 2 | 1 | | Dana Desa |
| 1 | 2 | 1 | 1 | Dana Desa |
| 1 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah |
| 1 | 2 | 2 | 1 | Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah |
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan keuangan dari APBD Provinsi |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten |
| 1 | 2 | 6 | | Bantuan keuangan dari APBN (Dalam/Luar) |
| 1 | 2 | 6 | 1 | Bantuan keuangan dari APBN (Dalam/Luar) |

| 1 | | | | 2 |
|----------|----------|----------|----------|---|
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat |
| | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Hasil kerjasama dengan pihak ketiga |
| 1 | 3 | 2 | 2 | Bantuan perusahaan yang berlokasi di desa |
| 1 | 3 | 2 | 3 | Pengembalian anggaran |

3. Kode Rekening Belanja Desa

| KODE | | | | | URAIAN |
|----------|---|---|----------|--|--|
| 1 | | | | | 2 |
| 2 | | | | | BELANJA DESA |
| 2 | 1 | | | | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
| 2 | 2 | | | | BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
| 2 | 3 | | | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
| 2 | 4 | | | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
| 2 | | 1 | | | Kegiatan |
| 2 | | 2 | | | Dst |
| | | | | | |
| 2 | | | 1 | | Belanja Pegawai |
| 2 | | | 1 1 | | Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | | | 1 2 | | Penghasilan staf Pemerintah Desa |
| 2 | | | 1 3 | | Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | | | 1 4 | | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | | | 1 5 | | Tunjangan akhir masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | | | 1 6 | | Tunjangan BPD dan anggotanya |
| 2 | | | 1 7 | | Uang Sidang BPD |
| 2 | | | 1 8 | | Insentif RT/RW |
| 2 | | | 1 9 | | Operasional Kepala Desa dan Perangkat Desa |
| 2 | | | 1 10 | | Tunjangan pengelola aset dan keuangan desa |
| 2 | | | 1 11 | | Dst |
| | | | | | |
| 2 | | | 2 | | Belanja Barang dan Jasa |
| 2 | | | 2 1 | | Belanja alat tulis kantor |
| | | | | | ... (pembelian kertas, amplop, alat tulis, tinta dll) |
| 2 | | | 2 2 | | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya |
| | | | | | ... (pembelian perangko, materai) |
| 2 | | | 2 3 | | Belanja perlengkapan kantor Lainnya |
| | | | | | ... (pembelian Lampu Pijar, Battery Kering, alat kebersihan bahan pembersih dll) |
| 2 | | | 2 4 | | Belanja Bahan |
| | | | | | ... (pembelian bibit tanaman, bibit ternak, obat-obatan dll) |
| 2 | | | 2 5 | | Belanja Jasa Kantor |
| | | | | | ... (Telpon, Listrik, Air, Admin Bank, Pajak Bunga, Surat Kabar, langganan internet, Alat Kebersihan, dll) |
| 2 | | | 2 6 | | Belanja Pemeliharaan dan/atau Pajak PBB |
| | | | | | ... (Pemeliharaan Bangunan, Peralatan, Perlengkapan, Kendaraan, Taman, Sarana) |
| 2 | | | 2 7 | | Belanja Perawatan dan/atau Kendaraan Bermotor |
| | | | | | ... (belanja service, suku cadang, pajak kendaraan, KIR dll) |
| 2 | | | 2 8 | | Sewa alat berat |
| | | | | | ... (Sewa Eksavator, bego dll) |
| 2 | | | 2 9 | | Belanja Cetak dan penggandaan |
| | | | | | ... (Cetak, Jilid, penggandaan) |

| 1 | | | | | 2 | | | | |
|----------|--|--|----------|----|--|--|--|--|--|
| 2 | | | 2 | 10 | Belanja Sewa | | | | |
| | | | | | ...(Sewa Kendaraan,Rumah,Gudang,Meja,kursi,tenda,soundsystem dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 11 | Belanja Makanan dan minuman | | | | |
| | | | | | ... (Mamin Rapat, Kegiatan peninjauan dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 12 | Belanja pakaian dinas dan khusus beserta atributnya | | | | |
| | | | | | ... (Pakaian Dinas Kades, perangkat desa, pakaian adat dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 13 | Belanja perjalanan dinas | | | | |
| | | | | | ... (Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah) | | | | |
| 2 | | | 2 | 14 | Belanja bahan bakar minyak (BBM)/Gas | | | | |
| 2 | | | 2 | 15 | Upah tenaga kerja | | | | |
| 2 | | | 2 | 16 | Honorarium narasumber/ ahli | | | | |
| 2 | | | 2 | 17 | Pemberian barang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat | | | | |
| 2 | | | 2 | 18 | Pemberian uang kepada masyarakat/ kelompok masyarakat | | | | |
| | | | | | ... (transport pelatihan, uang penghargaan, santunan, beasiswa dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | | ... (Honorarium PTPKD, Tim Pengelola Kegiatan, Insentif, dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 20 | Belanja Biaya Operasional Kegiatan | | | | |
| | | | | | ... (Biaya Operasional Kegiatan) | | | | |
| 2 | | | 2 | 21 | Belanja Dekorasi | | | | |
| | | | | | ... (Biaya Dekorasi, dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 22 | Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank, Pajak Bunga Bank, dll) | | | | |
| | | | | | ... (Biaya Administrasi Bank, Pajak Bank, dll) | | | | |
| 2 | | | 2 | 23 | Belanja Barang dan Jasa Lainnya ... dst | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | | | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | | | 3 | 1 | Belanja Modal Tanah | | | | |
| | | | | | ... (Pengadaan tanah pertanian, kuburan, kolam ikan dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 2 | Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Besar | | | | |
| | | | | | ... (pengadaan traktor, excavator grader, dredger dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 3 | Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan | | | | |
| | | | | | ... (Pengadaan kendaraan angkutan barang, roda 2, 3, 4, angkutan bermotor dan tak bermotor, baik darat, air maupun udara, dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 4 | Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel | | | | |
| | | | | | ... (Pengadan pekakas bengkel, alat las, bermesin & tak bermesin) | | | | |
| 2 | | | 3 | 5 | Belanja Modal Pengadaan Alat Ukur | | | | |
| | | | | | ... (Pengadaan alat kalibrasi, timbangan dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 6 | Belanja Modal Pengadaan Alat Pengolahan, Pemeliharaan & Penyimpan | | | | |
| | | | | | ... (Pengadaan alat panen, pengolahan peternakan, penangkap ikan, penyimpanan dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | | | | |
| | | | | | ... (pengadaan mesin tik, pengganda/reproduksi dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 8 | Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga | | | | |
| | | | | | ... (pengadaan meublair, alat pendingin, alat dapur, alat pemadam kebakaran dan alat rumah tangga lainnya) | | | | |
| 2 | | | 3 | 9 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | | | | |
| | | | | | ... (pengadaan komputer, pinter, scanner dll) | | | | |
| 2 | | | 3 | 10 | Belanja Modal Pengadaan Alat Studio | | | | |
| | | | | | (pengadaan LCD, video, film dll) | | | | |

| 1 | | | | 2 |
|---|--|---|----|--|
| 2 | | 3 | 11 | Belanja Modal Pengadaan Alat Komunikasi ... (pengadaan alat telepon, radio, sandi dll) |
| 2 | | 3 | 12 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin Lainnya ... (alat lab kesehatan, lingkungan hidup dll yg belum terdaftar) |
| 2 | | 3 | 13 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung ... (Pengadaan bangunan gedung kantor, bengkel, tempat ibadah, pemotongan hewan, rumah tempat tinggal dll) |
| 2 | | 3 | 14 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Menara, Tugu, Monumen dan Makam ... (pengadaan menara, makam (perlengkapan), rumah adat, tugu peringatan dll) |
| 2 | | 3 | 15 | Belanja Modal Pengadaan Jalan ... (pembangunan jalan desa jalan khusus) |
| 2 | | 3 | 16 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan ... (pembangunan jembatan desa dll) |
| 2 | | 3 | 17 | Belanja Modal Pengadaan Bangunan Air dan Irigasi ... (pembangunan irigasi, penangkap air, pengaman air, pembuang dan instalasi air bersih, kotor dll) |
| 2 | | 3 | 18 | Belanja Modal bangunan dan gedung Lainnya ... (pengadaan bangunan dan gedung yg belum termasuk katagori) |
| 2 | | 3 | 19 | Belanja Modal Pengadaan Buku ... (pengadaan buku dan barang perpustakaan) |
| 2 | | 3 | 20 | Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan ... (pengadaan bercorak, lukisan, alat kesenian, kerajinan dan benda bersejarah) |
| 2 | | 3 | 21 | Belanja Modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya ... (pengadaan alat olahraga, senam, dll) |
| 2 | | 3 | 22 | Belanja Modal Pengadaan Hewan ... (pengadaan binatang ternak, unggas, ikan dll) |
| 2 | | 3 | 23 | Belanja Modal Pengadaan Tanaman ... (pengadaan tanaman perkebunan, horikultura dll) |
| 2 | | 3 | 24 | Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi ... (pembangunan atas aset yang bukan milik desa) |
| 2 | | 3 | 25 | Belanja Modal Pengadaan Sistem Informasi Desa ... (website, software, dll) |
| 2 | | 3 | 26 | Belanja Modal Pengadaan Jaringan Listrik ... (pengadaan jaringan listrik, dll) |
| 2 | | 3 | 27 | Belanja Modal Lainnya ... dst |

4. Kode Rekening Pembiayaan

| Kode Rekening | | | | URAIAN |
|----------------------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | | | | 2 |
| 3 | | | | <i>Pembiayaan</i> |
| 3 | 1 | | | Penerimaan Pembiayaan |
| 3 | 1 | 1 | | SILPA |
| 3 | 1 | 2 | | Pencairan Dana Cadangan |
| 3 | 1 | 3 | | Hasil Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
| 3 | | | | dst..... |
| | | | | |
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa |
| 3 | | | | dst..... |
| | | | | |

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR 56 TAHUN 2017
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 PERATURAN BUPATI NOMOR 8
 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM
 DAN PROSEDUR PENGELOLAAN
 KEUANGAN DESA

CONTOH DAN FORMAT

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA SEMESTER

1) Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 SEMESTER PERTAMA
 PEMERINTAH DESA.....
 TAHUN ANGGARAN.....**

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------|----------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------|------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Hasil Laba BUM Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Tanah Desa | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | Swadaya dan Partisipasi | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jan-Jun... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jan-Jun... | | | | |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 1 | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |
| | | | | | | | | |
| 1 | 3 | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| | | | |dst. | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Penghasilan Staf Pemerintah Desa | | | | |
| | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | Belanja Peranko, Materai dan Benda Pos lainnya | | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|----|--|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Operasional dan Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | Tunjangan BPD dan Anggotanya | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Uang Sidang BPD | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | Insentif RT/RW | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Jalan Permukiman | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | Belanja Modal Pengadaan Jalan | | | | |
| | | | | | 1. Jalan Aspal Dusun A | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | 2. Jalan Paving Dusun B | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |

| 1 | | | | | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|----|---|--|--|--|--|---|---|---|---|
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Honorarium Narasumber /Ahli | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | | | | | |
| | | | | |dst. | | | | | | | | |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 6 | | | Pengobatan untuk lansia | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | | | | | |
| | | | | |dst. | | | | | | | | |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | Belanja Bahan | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | Sewa Alat Berat | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | | | | | |
| | | | | |dst. | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN | | | | | | | | |
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Dst... | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|--|-------------------------------|---|---|---|---|
| 3 | 2 | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| 3 | | | | Dst... | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA.....,

TTD
(.....)

Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir Tahun

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------|----------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------|------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA) | | | | |
| 1 | | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Hasil Laba BUM Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Tanah Desa | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | Swadaya dan Partisipasi | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | | Dana Desa | | | □C | |
| 1 | 2 | 2 | | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jan-Jun... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jan-Jun... | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 1 | | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain lain | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | |
| 2 | | | | | BELANJA | | | |
| 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | |
| | | | | |dst. | | | |
| 2 | 1 | 2 | | | Operasional Perkantoran | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | Belanja Pegawai | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Penghasilan Staf Pemerintah Desa | | | |
| | | | | |dst. | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya | | | |
| | | | | |dst. | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | | | |
| | | | | |dst. | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Operasional dan Tunjangan BPD | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | | Belanja Pegawai | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | Tunjangan BPD dan Anggotanya | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Uang Sidang BPD | | | |
| | | | | |dst. | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|----|--|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 4 | | | Operasional RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | Insentif RT/RW | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Jalan Permukiman | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | Belanja Modal Pengadaan Jalan | | | | |
| | | | | | 1. Jalan Aspal Dusun A | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |
| | | | | | 2. Jalan Paving Dusun B | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Masyarakat | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | Pembinaan Lembaga Masyarakat | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Honorarium Narasumber /Ahli | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| 2 | 4 | 6 | | | Pengobatan untuk lansia | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|----|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | Belanja Bahan | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | Sewa Alat Berat | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | |
| 3 | | | | | Dst..... | | | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| 3 | | | | | Dst..... | | | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA.....,

TTD
 (.....)

**D. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA**

**PEMERINTAH DESA.....
KECAMATAN.....
KABUPATEN.....**

**RANCANGAN PERATURAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN.....**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA..... ,

Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal... Peraturan Daerah Kabupaten..... Nomor... Tahun..... tentang....., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa..... Tahun Anggaran.....;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5539);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten..... Nomor..... Tahun..... tentang..... (Lembaran daerah Kabupaten..... Tahun..... Nomor.....);
5. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
Dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA..... TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN
20.... MENJADI PERATURAN DESA.....
TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA..... TAHUN
ANGGARAN 20....

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran..... dengan
rincian sebagai berikut:

| | |
|---|------------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | Rp..... |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... ===== = |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp..... |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.....</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp..... ===== = |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran
Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran.....;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektorial dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa.....

Pada tanggal.....

KEPALA DESA..... ,

Tanda tangan

(NAMA)

Diundangkan di Desa.....

Pada tanggal.....

SEKRETARIS DESA.....

Tanda tangan

(NAMA)

LEMBARAN DESA..... TAHUN..... NOMOR.....

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....**

| KODE REKENING | | | | | URAIAN | JUMLAH ANGGARAN (Rp.) | JUMLAH REALISASI (Rp.) | LEBIH/ KURANG (Rp.) | KET. |
|---------------|----------|---|---|--|--|-----------------------|------------------------|---------------------|------|
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | PENDAPATAN | | | | |
| 1 | 1 | | | | Pendapatan Asli Desa | | | | |
| 1 | 1 | 1 | | | Hasil Usaha | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Hasil Laba BUM Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | | | Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Tanah Desa | | | | |
| 1 | 1 | 3 | | | Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong | | | | |
| 1 | 1 | 3 | 1 | | Swadaya dan Partisipasi | | | | |
| 1 | 1 | 4 | | | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | | | Pendapatan Transfer | | | | |
| 1 | 2 | 1 | | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | | Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 2 | | | Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah kabupaten/ kota | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 2 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jul-Des... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | | Bagian dari hasil pajak daerah bagian Jan-Jun... | | | | |
| 1 | 2 | 2 | 4 | | Bagian dari hasil retribusi daerah bagian Jan-Jun... | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | | Alokasi Dana Desa | | | | |
| 1 | 2 | 4 | | | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | | Bantuan Keuangan APBD Provinsi | | | | |
| 1 | 2 | 5 | | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 5 | 1 | | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | | | | |
| 1 | 2 | 6 | | | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |
| 1 | 2 | 6 | 1 | | Bantuan Keuangan APBN Dalam/Luar | | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|----------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | | | | Pendapatan Lain lain | | | | |
| 1 | 3 | 1 | | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | | | |
| 1 | 3 | 2 | | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah | | | | |
| | | | | | JUMLAH PENDAPATAN | | | | |
| 2 | | | | | BELANJA | | | | |
| 2 | 1 | | | | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | | | Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 2 | | | Operasional Perkantoran | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Penghasilan Staf Pemerintah Desa | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Belanja Alat Tulis Kantor | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Belanja Perlengkapan Kantor Lainnya | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor | | | | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | 9 | Belanja Modal Pengadaan Komputer | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 3 | | | Operasional dan Tunjangan BPD | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | Tunjangan BPD dan anggotanya | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|----------|----------|---|----|--|--|--|--|--|
| 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | Uang Sidang BPD | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 1 | 4 | | | Insentif RT/ RW | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | | Belanja Pegawai | | | | |
| 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | Insentif RT/RW | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 2 | | | | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | |
| 2 | 2 | 1 | | | Jalan Permukiman | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 15 | Belanja Modal Pengadaan Jalan | | | | |
| | | | | | 1. Jalan Aspal Dusun A | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |
| | | | | | 2. Jalan Paving Dusun B | | | | |
| | | | | | - Pasir 100m3 x Rp.500.000 | | | | |
| | | | | | - Material | | | | |
| | | | | | - Upah Tukang 2 Orang x (30Hari x Rp. 95.000) | | | | |
| | | | | | - BOP ATK dan Honor TPK (5 Orang x Rp.500.000) | | | | |
| | | | | | -dst. | | | | |
| 2 | 3 | | | | Bidang Pembinaan Masyarakat | | | | |
| 2 | 3 | 1 | | | Pembinaan Lembaga Masyarakat | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | Belanja Cetak dan Penggandaan | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | Honorarium Narasumber /Ahli | | | | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 4 | | | | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | | | |
| 2 | 4 | 6 | | | Pengobatan untuk lansia | | | | |

| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|----------|---|---|---|----|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 11 | Belanja Makanan dan Minuman | | | | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 5 | | | | Bidang Tak Terduga | | | | |
| 2 | 5 | 1 | | | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | | Belanja Barang dan Jasa | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | Belanja Bahan | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 8 | Sewa Alat Berat | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 19 | Honorarium Pelaksana | | | | |
| | | | | |dst. | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | | Belanja Modal | | | | |
| 2 | 5 | 1 | 3 | 16 | Belanja Modal Pengadaan Jembatan | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH BELANJA | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | SURPLUS / DEFISIT | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | PEMBIAYAAN | | | | |
| 3 | 1 | | | | Penerimaan Pembiayaan | | | | |
| 3 | 1 | 1 | | | SILPA | | | | |
| 3 | 1 | 2 | | | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 1 | 3 | | | Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan | | | | |
| 3 | | | | | Dst..... | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 2 | | | | Pengeluaran Pembiayaan | | | | |
| 3 | 2 | 1 | | | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3 | 2 | 2 | | | Penyertaan Modal Desa | | | | |
| 3 | | | | | Dst..... | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | JUMLAH (RP) | | | | |

| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | | | | -Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN - PENGELUARAN PEMBIAYAAN) | | | | |
| | | | | -SILPA tahun Berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT) | | | | |

Tanggal,

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA.....,

TTD

(.....)

BUPATI MOJOKERTO,



MUSTOFA KAMAL PASA